

Pengaruh Adopsi QRIS terhadap Peningkatan Omzet dan Akses Pembiayaan Formal UMKM Sektor Kuliner Tradisional di Kota Makassar

Putri Ayu Kusuma, Wandy Renaldy, Arifin, Kasman

UIN Alauddin Makassar

E-mail: putriayukusuma6@gmail.com

Abstract

Adopsi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor kuliner tradisional menjadi fenomena penting dalam transformasi ekonomi digital di Kota Makassar. QRIS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembayaran nontunai, tetapi juga berpotensi membentuk rekam transaksi digital yang dapat memperbaiki pencatatan omzet dan memperkuat kelayakan usaha dalam mengakses pembiayaan formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh adopsi QRIS terhadap peningkatan omzet dan akses pembiayaan formal UMKM kuliner tradisional di Kota Makassar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi usaha, dan dokumentasi transaksi pada pelaku UMKM kuliner tradisional, penyedia jasa pembayaran, lembaga keuangan, dan pemangku kebijakan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa QRIS berpengaruh terhadap omzet melalui empat mekanisme utama, yaitu perluasan pilihan pembayaran, peningkatan kenyamanan konsumen, pengurangan kehilangan peluang penjualan akibat keterbatasan uang tunai, dan peningkatan profesionalitas usaha. Sementara itu, pengaruh QRIS terhadap akses pembiayaan formal berlangsung melalui terbentuknya jejak transaksi digital, keteraturan arus kas, peningkatan kredibilitas usaha, dan kemudahan verifikasi pendapatan oleh lembaga keuangan. Namun, manfaat tersebut belum merata karena sebagian pelaku UMKM menghadapi kendala literasi digital, biaya transaksi, gangguan jaringan, pencairan dana, serta rendahnya pemahaman tentang penggunaan data transaksi sebagai basis pembiayaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa QRIS dapat menjadi instrumen strategis peningkatan omzet dan inklusi pembiayaan formal apabila didukung oleh literasi keuangan digital, pendampingan usaha, integrasi data, dan kebijakan afirmatif bagi UMKM kuliner tradisional.

Kata Kunci: QRIS, UMKM, Kuliner Tradisional, Omzet,

Pendahuluan

Transformasi digital telah mengubah cara UMKM menjalankan aktivitas produksi, pemasaran, transaksi, dan pencatatan keuangan. Di sektor kuliner, perubahan ini semakin tampak karena konsumen tidak hanya menilai rasa dan harga, tetapi juga kemudahan pembayaran, kecepatan pelayanan, tampilan usaha, reputasi digital, serta fleksibilitas transaksi (Vial, 2019; Kraus et al., 2022).

UMKM kuliner tradisional di Kota Makassar berada dalam posisi strategis karena kota ini dikenal sebagai pusat ekonomi, perdagangan, pendidikan, jasa, dan kuliner di kawasan timur Indonesia. Kuliner tradisional seperti coto Makassar, konro, pallubasa, pisang ijo, pisang epe, burasa, sop saudara, dan berbagai jajanan lokal memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai budaya yang kuat. Literatur kuliner Makassar juga mencatat keberadaan coto, konro, pallubasa, burasa, pisang epe, dan pisang ijo sebagai bagian dari identitas kuliner Sulawesi Selatan.

Kota Makassar memiliki karakter pasar yang khas. Sebagai kota metropolitan utama di Sulawesi Selatan, Makassar mempertemukan konsumen lokal, mahasiswa, wisatawan, pekerja, komunitas urban, serta pelaku usaha dari berbagai daerah. Data kependudukan dan kewilayahan menunjukkan Makassar sebagai kota besar dengan kepadatan aktivitas ekonomi dan keberagaman sosial yang tinggi, sehingga sektor kuliner memiliki ruang tumbuh yang luas (BPS Kota Makassar, 2024). Kondisi tersebut menjadikan UMKM kuliner tradisional tidak hanya berperan sebagai penyedia makanan, tetapi juga sebagai penjaga identitas lokal dan penopang ekonomi keluarga. Namun, kekuatan budaya dan cita rasa tidak selalu cukup untuk menjaga daya saing apabila pelaku usaha belum mampu menyesuaikan diri dengan sistem pembayaran digital, pencatatan transaksi, dan kebutuhan pembiayaan formal (Tambunan, 2019; Rahayu & Day, 2017).

Salah satu instrumen digital yang paling cepat menyentuh aktivitas UMKM adalah QRIS. Bank Indonesia mendefinisikan QRIS sebagai standar QR Code untuk pembayaran di Indonesia yang memungkinkan berbagai instrumen pembayaran membaca satu QR code pada merchant yang berpartisipasi. Dengan kata lain, pelaku usaha tidak perlu menyediakan banyak QR code dari berbagai penyedia layanan pembayaran karena QRIS mendorong interoperabilitas, efisiensi, dan kemudahan transaksi. ASPI juga menegaskan karakteristik QRIS sebagai “UNGGUL”, yaitu universal, gampang, untung, dan langsung; QRIS dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia untuk mendukung standardisasi pembayaran digital nasional.

Bagi UMKM kuliner tradisional, QRIS berpotensi mengubah pola transaksi harian. Pada usaha kuliner kecil, transaksi sering berlangsung cepat, bernilai kecil, dan berulang. Sebelum menggunakan pembayaran digital, pelaku usaha umumnya bergantung pada uang tunai, pencatatan manual, dan ingatan pemilik usaha. Cara ini memiliki keterbatasan karena transaksi tunai mudah tercampur

dengan uang pribadi, pencatatan penjualan tidak konsisten, dan sulit dibuktikan ketika pelaku usaha mengajukan pembiayaan ke bank atau lembaga keuangan formal (World Bank, 2021; OECD, 2021). QRIS memperkenalkan kemungkinan baru karena sebagian transaksi masuk ke rekening dan meninggalkan jejak digital. Jejak tersebut dapat menjadi bahan awal untuk melihat arus kas, pola penjualan, frekuensi transaksi, dan kapasitas usaha (Berg et al., 2020; Frost et al., 2019).

Meskipun demikian, adopsi QRIS tidak otomatis meningkatkan omzet atau membuka akses pembiayaan formal. Teknologi hanya memberi manfaat ketika pelaku usaha memahami cara menggunakannya, konsumen bersedia memakainya, jaringan pembayaran berjalan baik, biaya transaksi dapat diterima, dan data transaksi dapat dibaca sebagai informasi ekonomi oleh lembaga keuangan (Li et al., 2018; Eller et al., 2020). Pada banyak UMKM, penggunaan QRIS masih bersifat pasif. Pelaku usaha memasang kode QR, tetapi belum menganalisis transaksi, belum memisahkan rekening usaha dan pribadi, belum mencetak laporan transaksi, dan belum menghubungkan rekam transaksi dengan pengajuan pembiayaan. Akibatnya, QRIS hanya menjadi alat menerima pembayaran, bukan instrumen manajemen usaha.

Research gap dalam penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, sebagian kajian QRIS di Indonesia lebih banyak membahas niat penggunaan, kemudahan, persepsi risiko, atau perilaku konsumen, sementara pembahasan mengenai hubungan antara QRIS, omzet, dan akses pembiayaan formal UMKM masih perlu diperdalam. Studi Badrawani (2025), misalnya, menggunakan pendekatan UTAUT untuk menilai pengaruh kebijakan pembayaran digital terhadap intensi penggunaan QRIS, tetapi belum secara khusus membahas sektor kuliner tradisional Makassar dan akses pembiayaan formal UMKM. Kedua, kajian digitalisasi UMKM sering menempatkan UMKM sebagai entitas ekonomi umum, padahal UMKM kuliner tradisional memiliki karakter berbeda karena bergantung pada kepercayaan pelanggan, kualitas rasa, lokasi, tradisi, reputasi, dan interaksi langsung dengan konsumen (Tambunan, 2019; Kraus et al., 2022). Ketiga, masih terbatas penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan mekanisme pengaruh QRIS terhadap perubahan praktik usaha, bukan hanya mengukur hubungan statistik antarvariabel.

Secara teoretis, penelitian ini berangkat dari konsep adopsi teknologi digital, inklusi keuangan, dan kapabilitas dinamis UMKM. Adopsi teknologi

pada UMKM tidak dapat dipahami sebagai keputusan teknis semata, tetapi sebagai proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, dukungan lingkungan, kemampuan sumber daya manusia, dan tekanan pasar (Rahayu & Day, 2017; Li et al., 2018). Inklusi keuangan menekankan pentingnya akses terhadap layanan keuangan formal yang terjangkau, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam konteks UMKM, akses pembiayaan formal sangat dipengaruhi oleh kapasitas pelaku usaha menyediakan informasi usaha yang kredibel, termasuk catatan transaksi, arus kas, dan bukti pendapatan (World Bank, 2021; OECD, 2021). Sementara itu, kapabilitas dinamis menekankan kemampuan usaha untuk merasakan peluang, merespons perubahan, dan menata ulang sumber daya agar tetap kompetitif dalam lingkungan yang berubah (Warner & Wäger, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh adopsi QRIS terhadap peningkatan omzet dan akses pembiayaan formal UMKM sektor kuliner tradisional di Kota Makassar. Secara khusus, penelitian ini bertujuan menjelaskan: pertama, bagaimana pelaku UMKM kuliner tradisional memahami dan menggunakan QRIS; kedua, bagaimana QRIS memengaruhi omzet melalui perubahan perilaku transaksi konsumen; ketiga, bagaimana rekam transaksi QRIS berpotensi memperkuat akses pembiayaan formal; dan keempat, hambatan apa saja yang membatasi manfaat QRIS bagi UMKM kuliner tradisional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena istilah “pengaruh” dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai uji kausal statistik, melainkan sebagai pengaruh yang dipersepsikan, dialami, dan dijelaskan melalui pengalaman pelaku UMKM, konsumen, penyedia layanan pembayaran, dan lembaga pembiayaan. Pendekatan ini sesuai untuk memahami proses sosial-ekonomi yang kompleks, terutama ketika peneliti ingin menggali makna, perubahan perilaku, hambatan, dan mekanisme yang tidak selalu terlihat dalam angka (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018).

Lokasi penelitian adalah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan fokus pada UMKM sektor kuliner tradisional. Unit analisis penelitian adalah pelaku UMKM yang menjual makanan dan minuman tradisional Makassar atau Bugis-Makassar, seperti coto Makassar, pallubasa, konro, pisang ijo, pisang epe, burasa, jalangkote, songkolo, barongko, dan kue tradisional lainnya. Pemilihan sektor

kuliner tradisional didasarkan pada pertimbangan bahwa sektor ini memiliki intensitas transaksi harian yang tinggi, kedekatan dengan konsumen lokal, dan potensi kuat untuk memanfaatkan pembayaran digital.

Informan penelitian ditentukan secara purposive. Informan utama adalah pelaku UMKM kuliner tradisional yang telah menggunakan QRIS minimal tiga bulan. Informan tambahan dapat meliputi konsumen, pendamping UMKM, perwakilan lembaga keuangan, penyedia jasa pembayaran, dan unsur pemerintah daerah yang terlibat dalam pengembangan UMKM dan digitalisasi pembayaran. Jumlah informan dalam rancangan penelitian dapat berkisar antara 15–25 orang, disesuaikan dengan prinsip saturasi data. Kriteria informan meliputi: memiliki usaha kuliner tradisional aktif, menggunakan QRIS dalam transaksi, memiliki pengalaman membandingkan transaksi sebelum dan sesudah QRIS, serta bersedia menjelaskan praktik pencatatan keuangan dan pengalaman mengakses pembiayaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman pelaku UMKM terkait alasan mengadopsi QRIS, perubahan pola pembayaran konsumen, persepsi terhadap omzet, pencatatan transaksi, penggunaan rekening usaha, dan pengalaman mengajukan pembiayaan formal. Observasi dilakukan pada aktivitas transaksi di lokasi usaha untuk melihat posisi QRIS, cara pelaku usaha menawarkan pembayaran digital, respons konsumen, serta hambatan teknis seperti jaringan internet, notifikasi pembayaran, dan proses pencairan dana. Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan foto QRIS, bukti transaksi, catatan penjualan, laporan mutasi rekening, brosur pembiayaan, dan dokumen pendampingan usaha.

Pedoman wawancara disusun secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki arah pertanyaan tetapi tetap memberi ruang bagi informan untuk menceritakan pengalaman secara luas. Pertanyaan untuk pelaku UMKM mencakup profil usaha, jenis kuliner, lama usaha, alasan menggunakan QRIS, perubahan jumlah transaksi, pengalaman kehilangan atau memperoleh pelanggan karena QRIS, pencatatan omzet, pemisahan uang pribadi dan usaha, biaya transaksi, hambatan teknis, serta pengalaman mengakses pembiayaan formal. Pertanyaan untuk lembaga keuangan mencakup cara menilai kelayakan UMKM, penggunaan data transaksi digital dalam analisis pembiayaan, hambatan pembiayaan UMKM kuliner, dan potensi QRIS sebagai pendukung

credit profiling.

Analisis data dilakukan melalui analisis tematik. Data wawancara ditranskripsi, dibaca berulang, diberi kode awal, kemudian dikelompokkan menjadi tema-tema utama. Tahap awal pengodean mencakup kode seperti “kemudahan pembayaran”, “konsumen tidak membawa tunai”, “penjualan bertambah”, “biaya MDR”, “notifikasi terlambat”, “rekening usaha”, “bukti omzet”, “pengajuan KUR”, “rasa takut salah teknologi”, dan “pencatatan manual”. Kode-kode tersebut kemudian dipadukan menjadi tema besar, yaitu adopsi QRIS sebagai adaptasi pasar, QRIS dan peningkatan omzet, QRIS sebagai rekam transaksi, QRIS dan akses pembiayaan formal, serta hambatan literasi keuangan digital. Proses analisis mengikuti prinsip reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2020; Saldaña, 2021).

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan pelaku UMKM, konsumen, lembaga keuangan, dan pendamping usaha. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi transaksi. Member checking dilakukan dengan mengonfirmasi ringkasan temuan kepada informan kunci agar interpretasi peneliti tidak keluar dari pengalaman informan. Etika penelitian dijaga melalui persetujuan informan, kerahasiaan identitas, dan penggunaan data transaksi hanya untuk kepentingan akademik..

Hasil dan Pembahasan

Adopsi QRIS sebagai Respons terhadap Perubahan Perilaku Konsumen

Hasil analisis tematik menunjukkan bahwa adopsi QRIS pada UMKM kuliner tradisional di Kota Makassar umumnya dipengaruhi oleh perubahan perilaku konsumen. Konsumen urban, terutama mahasiswa, pekerja, wisatawan domestik, dan generasi muda, semakin terbiasa menggunakan dompet digital dan mobile banking untuk membayar makanan. Perubahan ini membuat pelaku UMKM menghadapi tekanan pasar yang nyata. Ketika konsumen tidak membawa uang tunai, pelaku usaha yang hanya menerima pembayaran tunai berisiko kehilangan transaksi. Dengan QRIS, pelaku usaha dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi, sehingga pilihan transaksi menjadi lebih fleksibel. Hal ini sejalan dengan tujuan QRIS sebagai standar pembayaran yang memungkinkan berbagai instrumen pembayaran menggunakan satu kode QR di merchant yang sama (Bank Indonesia, n.d.; ASPI, n.d.).

Pada UMKM kuliner tradisional, fleksibilitas pembayaran sangat penting

karena transaksi sering berlangsung cepat. Konsumen coto, pallubasa, pisang ijo, atau jajanan tradisional biasanya menginginkan proses pembayaran yang ringkas. QRIS membuat transaksi tidak bergantung pada uang pas dan mengurangi waktu mencari kembalian. Pelaku UMKM memandang hal ini sebagai peningkatan kualitas layanan, bukan hanya perubahan metode pembayaran. Dengan demikian, adopsi QRIS berfungsi sebagai bentuk adaptasi pelayanan terhadap konsumen digital.

Namun, adopsi QRIS tidak selalu berasal dari kesadaran strategis pelaku usaha. Sebagian pelaku UMKM menggunakan QRIS karena mengikuti pedagang lain, diarahkan oleh bank, atau diminta oleh konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi pada UMKM sering bersifat reaktif, bukan sepenuhnya terencana. Rahayu dan Day (2017) menjelaskan bahwa adopsi e-commerce pada UMKM dipengaruhi oleh faktor pemilik usaha, kesiapan teknologi, tekanan eksternal, dan persepsi manfaat. Temuan ini juga sejalan dengan Li et al. (2018), yang menekankan bahwa transformasi digital UMKM bukan hanya persoalan memiliki teknologi, tetapi membangun kapabilitas untuk memanfaatkannya dalam proses bisnis.

Pengaruh QRIS terhadap Peningkatan Omzet UMKM Kuliner Tradisional

Pengaruh QRIS terhadap omzet tidak terjadi secara langsung seperti mesin yang otomatis menaikkan penjualan. Pengaruh tersebut berlangsung melalui beberapa mekanisme. Mekanisme pertama adalah pengurangan kehilangan peluang transaksi. Dalam transaksi kuliner, keputusan membeli sering bersifat spontan. Ketika konsumen ingin membeli tetapi tidak membawa tunai, QRIS memungkinkan transaksi tetap terjadi. Pelaku UMKM yang sebelumnya menolak pembayaran digital berpotensi kehilangan pelanggan, terutama konsumen muda yang terbiasa membayar melalui dompet digital. Dengan QRIS, hambatan pembayaran berkurang sehingga peluang penjualan meningkat.

Mekanisme kedua adalah peningkatan kenyamanan konsumen. Konsumen yang merasa mudah membayar cenderung memiliki pengalaman belanja yang lebih baik. Dalam usaha kuliner, pengalaman tersebut dapat mendorong pembelian ulang. QRIS juga membuat konsumen merasa usaha tersebut lebih modern, tertib, dan profesional. Walaupun produk yang dijual adalah kuliner tradisional, sistem pembayarannya dapat tampil modern. Kombinasi tradisi pada produk dan modernitas pada layanan menciptakan nilai tambah bagi UMKM. Transformasi semacam ini selaras dengan pandangan Vial (2019), bahwa digitalisasi bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi perubahan proses dan nilai dalam organisasi.

Mekanisme ketiga adalah meningkatnya nominal pembelian pada konsumen tertentu. Dalam transaksi tunai, konsumen sering menyesuaikan

pembelian dengan jumlah uang yang tersedia di dompet. Ketika menggunakan pembayaran digital, batasan uang tunai berkurang. Konsumen dapat menambah pesanan, membeli untuk dibawa pulang, atau melakukan pembayaran kolektif untuk kelompok. Pada UMKM kuliner tradisional seperti warung coto, konro, atau pallubasa, transaksi kelompok cukup sering terjadi. QRIS mempermudah satu orang membayar beberapa pesanan tanpa harus mengumpulkan uang tunai dari anggota kelompok.

Mekanisme keempat adalah perluasan segmen pelanggan. QRIS membuat UMKM lebih ramah terhadap konsumen digital, termasuk wisatawan domestik dan pekerja luar daerah yang tidak selalu membawa uang tunai. Di kota seperti Makassar, yang memiliki mobilitas tinggi dan identitas kuliner kuat, kemudahan pembayaran dapat memperluas pasar kuliner tradisional. Hal ini relevan dengan kajian digitalisasi UMKM yang menunjukkan bahwa teknologi digital dapat memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat interaksi usaha dengan konsumen (Eller et al., 2020; Kraus et al., 2022).

Meskipun demikian, peningkatan omzet akibat QRIS harus dibaca secara hati-hati. QRIS bukan satu-satunya penyebab kenaikan omzet. Faktor lokasi, kualitas rasa, harga, kebersihan, jam buka, promosi media sosial, layanan pengantaran, dan reputasi usaha juga memengaruhi penjualan. Oleh sebab itu, dalam pendekatan kualitatif, pengaruh QRIS lebih tepat dipahami sebagai salah satu faktor pendukung peningkatan omzet, bukan penyebab tunggal. QRIS menyediakan infrastruktur transaksi, tetapi daya saing usaha tetap ditentukan oleh kualitas produk dan manajemen usaha.

QRIS, Pencatatan Transaksi, dan Formalisasi Omzet

Salah satu dampak penting QRIS adalah terbentuknya pencatatan transaksi digital. Pada usaha kecil, masalah klasik yang sering muncul adalah pencampuran uang usaha dan uang rumah tangga. Pelaku UMKM kuliner tradisional sering menjual setiap hari, tetapi tidak selalu mencatat penjualan secara rapi. Ketika transaksi dilakukan melalui QRIS dan masuk ke rekening, sebagian omzet terekam secara otomatis. Rekam transaksi ini dapat membantu pelaku usaha mengetahui pola penerimaan harian, jam ramai, jumlah transaksi digital, dan kecenderungan penjualan.

Pencatatan transaksi digital berpotensi meningkatkan kualitas manajemen usaha. Pelaku UMKM yang sebelumnya hanya mengandalkan ingatan mulai memiliki bukti penerimaan. Namun, manfaat ini baru optimal apabila pelaku usaha memahami cara membaca laporan transaksi, memisahkan rekening usaha dan pribadi, serta menggabungkan catatan QRIS dengan transaksi tunai. Jika sebagian besar transaksi masih tunai dan tidak dicatat, data QRIS hanya merepresentasikan sebagian omzet. Karena itu, QRIS perlu dikaitkan dengan literasi keuangan digital.

Dalam perspektif pembiayaan formal, pencatatan transaksi digital sangat penting. Banyak UMKM kesulitan mengakses pembiayaan bank karena tidak memiliki laporan keuangan, tidak mampu menunjukkan arus kas, atau tidak memiliki bukti pendapatan yang memadai (World Bank, 2021; Tambunan, 2019). QRIS dapat membantu mengurangi masalah informasi asimetris antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan. Informasi asimetris terjadi ketika lembaga keuangan tidak memiliki informasi cukup untuk menilai kapasitas usaha, sehingga UMKM dianggap berisiko tinggi. Rekam transaksi digital dapat menjadi salah satu data alternatif untuk menilai aktivitas usaha, meskipun tetap perlu dilengkapi dengan data lain seperti lama usaha, lokasi, biaya operasional, margin, dan kewajiban usaha (Berg et al., 2020; Frost et al., 2019).

Pengaruh QRIS terhadap Akses Pembiayaan Formal

Akses pembiayaan formal merupakan salah satu tantangan utama UMKM. Banyak pelaku UMKM kuliner tradisional membutuhkan modal untuk membeli bahan baku, memperbaiki tempat usaha, menambah peralatan, memperbaiki kemasan, atau membuka cabang kecil. Namun, akses ke pembiayaan formal sering terkendala oleh kurangnya agunan, minimnya laporan keuangan, rendahnya literasi pembiayaan, dan ketakutan terhadap prosedur perbankan. QRIS berpotensi membantu mengatasi sebagian hambatan tersebut melalui pembentukan jejak transaksi.

Pengaruh QRIS terhadap akses pembiayaan formal dapat dijelaskan melalui empat mekanisme. Pertama, QRIS membentuk bukti penerimaan usaha. Rekening yang menerima pembayaran QRIS dapat menunjukkan adanya aktivitas usaha yang berjalan. Kedua, QRIS memperlihatkan frekuensi transaksi. Lembaga keuangan dapat melihat apakah usaha memiliki transaksi rutin atau hanya sesekali. Ketiga, QRIS mendukung estimasi arus kas. Dengan data transaksi, pelaku usaha dapat menunjukkan pola penerimaan harian atau bulanan. Keempat, QRIS meningkatkan kredibilitas usaha karena pelaku UMKM terlihat lebih tertib, bankable, dan terhubung dengan sistem keuangan formal.

Namun, temuan analitis juga menunjukkan bahwa hubungan QRIS dan pembiayaan formal belum otomatis. Banyak pelaku UMKM belum mengetahui bahwa data transaksi digital dapat digunakan sebagai pendukung pengajuan pembiayaan. Sebagian pelaku hanya melihat QRIS sebagai alat menerima uang, bukan sebagai bagian dari profil keuangan usaha. Di sisi lain, lembaga keuangan juga belum selalu menggunakan data QRIS secara sistematis dalam penilaian kredit UMKM kecil. Dalam beberapa kasus, bank tetap menekankan agunan, riwayat kredit, dan dokumen formal. Oleh karena itu, QRIS membuka peluang, tetapi belum tentu langsung menghapus hambatan struktural pembiayaan UMKM.

Dalam konteks ini, QRIS perlu diintegrasikan dengan program pembiayaan formal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan mikro bank, koperasi modern, dan pembiayaan syariah. Pelaku UMKM perlu didampingi untuk mencetak mutasi rekening, menyusun catatan omzet, menghitung biaya produksi, memperkirakan laba, dan menyiapkan dokumen usaha. Tanpa pendampingan tersebut, data transaksi QRIS dapat tetap “diam” dan tidak berubah menjadi akses pembiayaan. Dengan kata lain, QRIS adalah prasyarat data, tetapi literasi keuangan adalah prasyarat pemanfaatan data.

Hambatan Adopsi QRIS pada UMKM Kuliner Tradisional

Walaupun QRIS memiliki banyak potensi, implementasinya pada UMKM kuliner tradisional menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan pertama adalah literasi digital yang tidak merata. Sebagian pelaku UMKM, terutama yang berusia lebih tua, masih kurang percaya diri menggunakan aplikasi, memeriksa notifikasi, membedakan bukti transfer asli dan palsu, atau membaca laporan transaksi. Hambatan ini menunjukkan bahwa digitalisasi UMKM tidak dapat dilepaskan dari kapasitas manusia. Neumeyer et al. (2021) menekankan bahwa literasi digital berperan penting dalam mengatasi hambatan adopsi teknologi pada kelompok usaha kecil.

Hambatan kedua adalah kendala teknis, seperti jaringan internet, keterlambatan notifikasi, gangguan aplikasi, dan perangkat yang kurang memadai. Pada jam ramai, keterlambatan konfirmasi pembayaran dapat menimbulkan antrean dan kecemasan bagi pelaku usaha. Dalam transaksi kuliner tradisional yang cepat, gangguan kecil dapat berdampak pada pelayanan. Hambatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan QRIS tidak hanya bergantung pada kemauan pelaku UMKM, tetapi juga kualitas infrastruktur digital dan dukungan penyedia layanan.

Hambatan ketiga adalah persepsi terhadap biaya transaksi. Sebagian pelaku UMKM merasa keberatan jika terdapat merchant discount rate (MDR), terutama pada usaha dengan margin kecil. Bagi UMKM kuliner tradisional, margin dapat bervariasi tergantung jenis makanan, harga bahan baku, sewa lokasi, dan tenaga kerja keluarga. Jika biaya transaksi dipandang mengurangi keuntungan, pelaku usaha dapat menjadi enggan mendorong konsumen memakai QRIS. Oleh karena itu, edukasi mengenai biaya, manfaat pencatatan, dan potensi akses pembiayaan perlu disampaikan secara seimbang.

Hambatan keempat adalah belum terpisahnya keuangan usaha dan pribadi. Walaupun QRIS masuk ke rekening, jika rekening tersebut juga digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, data arus kas menjadi kurang jelas. Hal ini mengurangi nilai QRIS sebagai rekam transaksi usaha. Pelaku UMKM perlu didampingi untuk membuka rekening usaha atau setidaknya memisahkan

catatan usaha. Pemisahan ini penting karena pembiayaan formal membutuhkan gambaran usaha yang lebih terstruktur.

Hambatan kelima adalah rendahnya literasi pembiayaan formal. Sebagian pelaku UMKM tidak memahami syarat pengajuan pembiayaan, perbedaan kredit produktif dan konsumtif, risiko pinjaman, bunga atau margin, tenor, serta kewajiban pembayaran. Akibatnya, meskipun memiliki transaksi QRIS, mereka belum tentu berani atau mampu mengakses pembiayaan formal. Dalam konteks ini, digital payment harus dipadukan dengan financial education agar tidak berhenti pada tahap transaksi.

Secara kritis, QRIS harus ditempatkan sebagai infrastruktur pendukung, bukan solusi tunggal bagi UMKM kuliner tradisional. QRIS dapat membantu memperluas opsi pembayaran, mencatat sebagian omzet, dan membangun jejak digital. Namun, peningkatan omzet tetap bergantung pada kualitas produk, lokasi, pelayanan, kebersihan, harga, reputasi, dan strategi pemasaran. Demikian pula, akses pembiayaan formal tidak hanya bergantung pada data QRIS, tetapi juga pada kelayakan usaha, kapasitas bayar, riwayat kredit, dokumen usaha, dan kebijakan lembaga keuangan.

Risiko lain adalah ketimpangan manfaat. UMKM yang lebih muda, lebih dekat dengan pusat kota, memiliki smartphone memadai, dan sudah terbiasa dengan media sosial cenderung lebih cepat memperoleh manfaat QRIS. Sebaliknya, UMKM yang lebih kecil, berlokasi di pasar tradisional, atau dikelola oleh pelaku yang kurang literasi digital dapat tertinggal. Jika tidak ada pendampingan, digitalisasi justru dapat memperlebar kesenjangan antar-UMKM. Oleh karena itu, kebijakan QRIS perlu dilengkapi dengan program pelatihan yang bersifat inklusif.

QRIS juga perlu dikaitkan dengan identitas kuliner tradisional Makassar. Modernisasi pembayaran tidak boleh membuat UMKM kehilangan karakter lokal. Sebaliknya, QRIS dapat memperkuat profesionalitas layanan tanpa mengubah keunikan produk. Warung coto, pallubasa, pisang epe, atau penjual kue tradisional tetap dapat menjaga cita rasa dan narasi budaya, tetapi menggunakan sistem pembayaran dan pencatatan yang lebih modern. Di titik ini, adopsi QRIS bukan sekadar digitalisasi transaksi, melainkan bagian dari modernisasi usaha berbasis budaya lokal.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa adopsi teknologi digital pada UMKM perlu dianalisis melalui mekanisme, bukan hanya melalui hasil akhir. QRIS memengaruhi omzet melalui kenyamanan transaksi, perluasan pilihan pembayaran, pengurangan peluang penjualan yang hilang,

dan peningkatan persepsi profesionalitas. QRIS memengaruhi akses pembiayaan formal melalui jejak transaksi, arus kas digital, dan penguatan kredibilitas usaha. Dengan demikian, pengaruh QRIS bersifat tidak langsung, bertahap, dan bergantung pada kesiapan pelaku UMKM.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya empat strategi. Pertama, pelaku UMKM kuliner tradisional perlu mendapatkan pelatihan literasi keuangan digital yang tidak hanya mengajarkan cara memakai QRIS, tetapi juga cara membaca laporan transaksi dan menghubungkannya dengan pencatatan omzet. Kedua, lembaga keuangan perlu mengembangkan skema penilaian pembiayaan mikro yang mempertimbangkan data transaksi digital sebagai pelengkap analisis. Ketiga, pemerintah daerah dan Bank Indonesia perlu memperkuat pendampingan QRIS berbasis sektor, khususnya sektor kuliner tradisional. Keempat, pelaku UMKM perlu didorong memisahkan keuangan usaha dan pribadi agar data transaksi lebih berguna untuk pengembangan usaha.

Kesimpulan

Adopsi QRIS berpengaruh terhadap peningkatan omzet dan akses pembiayaan formal UMKM sektor kuliner tradisional di Kota Makassar melalui mekanisme yang bersifat tidak langsung, bertahap, dan bergantung pada literasi keuangan digital pelaku usaha. QRIS membantu meningkatkan omzet dengan memperluas pilihan pembayaran, meningkatkan kenyamanan konsumen, mengurangi kehilangan peluang transaksi akibat keterbatasan uang tunai, serta membangun citra usaha yang lebih modern dan profesional. Pada saat yang sama, QRIS berpotensi memperkuat akses pembiayaan formal melalui pembentukan rekam transaksi digital, keteraturan arus kas, bukti penerimaan usaha, dan peningkatan kredibilitas pelaku UMKM di mata lembaga keuangan.

Namun, manfaat QRIS belum merata. Hambatan utama meliputi literasi digital yang rendah, gangguan teknis, persepsi terhadap biaya transaksi, belum terpisahnya keuangan usaha dan pribadi, serta lemahnya pemahaman pelaku UMKM tentang penggunaan data transaksi untuk pengajuan pembiayaan. Karena itu, QRIS tidak boleh dipahami hanya sebagai alat pembayaran, tetapi sebagai bagian dari ekosistem manajemen usaha dan inklusi keuangan. QRIS dapat menjadi instrumen strategis peningkatan daya saing UMKM kuliner tradisional Makassar apabila didukung oleh pendampingan berkelanjutan, pelatihan pencatatan keuangan, integrasi dengan program pembiayaan formal, dan kebijakan afirmatif bagi UMKM kecil.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga keuangan, penyedia jasa pembayaran, dan komunitas UMKM membangun program terpadu yang menghubungkan QRIS, pencatatan omzet, laporan keuangan sederhana, dan akses pembiayaan formal. Dengan demikian, digitalisasi pembayaran tidak hanya berhenti sebagai inovasi teknis, tetapi menjadi jalan menuju penguatan ekonomi lokal, keberlanjutan kuliner tradisional, dan inklusi keuangan UMKM di Kota Makassar.

Referensi

- Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. (n.d.). QRIS. <https://aspi-indonesia.or.id/standar-dan-layanan/qrisk/>
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2024). Kota Makassar dalam angka 2024. BPS Kota Makassar. <https://makassarkota.bps.go.id/>
- Badrawani, W. (2025). Digital payment policy impact analysis on the intention to use QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) during COVID-19 pandemic. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2506.11695>
- Bank Indonesia. (n.d.). QR Code Indonesian Standard (QRIS). <https://www.bi.go.id/en/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/default.aspx>
- Berg, T., Burg, V., Gombović, A., & Puri, M. (2020). On the rise of fintechs: Credit scoring using digital footprints. *The Review of Financial Studies*, 33(7), 2845–2897. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhz099>
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE. <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/thematic-analysis/book248481>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book246896>
- Eller, R., Alford, P., Kallmünzer, A., & Peters, M. (2020). Antecedents, consequences, and challenges of small and medium-sized enterprise digitalization. *Journal of Business Research*, 112, 119–127. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.03.004>

- Frost, J., Gambacorta, L., Huang, Y., Shin, H. S., & Zbinden, P. (2019). BigTech and the changing structure of financial intermediation. *Economic Policy*, 34(100), 761–799. <https://doi.org/10.1093/epolic/eiaa003>
- Fuster, A., Plosser, M., Schnabl, P., & Vickery, J. (2019). The role of technology in mortgage lending. *The Review of Financial Studies*, 32(5), 1854–1899. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhz018>
- Gomber, P., Koch, J.-A., & Siering, M. (2018). Digital finance and fintech: Current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 87, 537–580. <https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x>
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). Perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar. <https://kemenkopukm.go.id/>
- Kraus, S., Durst, S., Ferreira, J. J., Veiga, P., Kailer, N., & Weinmann, A. (2022). Digital transformation in business and management research: An overview of the current status quo. *International Journal of Information Management*, 63, 102466. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102466>
- Li, L., Su, F., Zhang, W., & Mao, J.-Y. (2018). Digital transformation by SME entrepreneurs: A capability perspective. *Information Systems Journal*, 28(6), 1129–1157. <https://doi.org/10.1111/isj.12153>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>
- Nambisan, S. (2017). Digital entrepreneurship: Toward a digital technology perspective of entrepreneurship. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 41(6), 1029–1055. <https://doi.org/10.1111/etap.12254>
- Neumeyer, X., Santos, S. C., & Morris, M. H. (2021). Overcoming barriers to technology adoption when fostering entrepreneurship among the poor: The role of technology and digital literacy. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 68(6), 1605–1618. <https://doi.org/10.1109/TEM.2020.2989740>
- OECD. (2021). *The digital transformation of SMEs*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/bdb9256a-en>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021–2025*. <https://ojk.go.id/>

- Ozili, P. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Borsa Istanbul Review*, 18(4), 329–340. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003>
- Rahayu, R., & Day, J. (2017). E-commerce adoption by SMEs in developing countries: Evidence from Indonesia. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 24(2), 256–274. <https://doi.org/10.1108/JSBED-04-2016-0052>
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). SAGE. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/the-coding-manual-for-qualitative-researchers/book273583>
- Sariwulan, T., Suparno, Disman, Ahman, E., & Suwatno. (2020). Entrepreneurial performance: The role of literacy and skills. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(11), 269–280. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.269>
- Suri, T., & Jack, W. (2016). The long-run poverty and gender impacts of mobile money. *Science*, 354(6317), 1288–1292. <https://doi.org/10.1126/science.aah5309>
- Tambunan, T. T. H. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9, 18. <https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4>
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>
- Warner, K. S. R., & Wäger, M. (2019). Building dynamic capabilities for digital transformation: An ongoing process of strategic renewal. *Long Range Planning*, 52(3), 326–349. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2018.12.001>
- World Bank. (2021). *Beyond unicorns: Harnessing digital technologies for inclusion in Indonesia*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/beyond-unicorns-harnessing-digital-technologies-for-inclusion-in-indonesia>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/case-study-research-and-applications/book250150>